

ABSTRACT

Democracy is one of the systems used in the Indonesian State. Democracy is the voice of the people. This means that the people determine sovereignty and determine the direction of the political journey of a country and government. General elections are an important means of democracy. In the context of organizing a democratic party, neutrality is a dynamic, the most important problem in carrying out general elections is the involvement of state civil apparatus here called Civil Servants. Civil servants are the main subjects in a bureaucracy that have a special role to carry out state and government tasks. In this case, civil servants are an element in the creation of services to the community in a professional, fair and equitable manner. The position of the state apparatus is an element of public service and has a high loyalty mentality to the state. This implies that civil servants are required to be neutral from the influence of all groups of political parties and not to discriminate against public services. The purpose of this study was to determine BKPSDM's efforts in monitoring the neutrality of civil servants in the 2018 District Heads Election in Jambi City and to find out the problems faced by BKPSDM in monitoring the neutrality of civil servants in the 2018 District Heads Election in Jambi City. This research is a qualitative descriptive research using primary data and secondary data obtained from interviews, observation and document review. To ensure the validity of the data used, the author uses data triangulation techniques and analysis of thought used is an interactive model analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Keywords: BKPSDM, Neutrality, Civil Servants, District Heads Election.

INTISARI

Demokrasi menjadi salah satu sistem yang digunakan di Negara Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat. Artinya rakyat menentukan kedaulatan dan menentukan arah perjalanan politik suatu negara dan pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi terpenting. Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi, netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan pemilihan umum ialah keterlibatan ASN disini disebut dengan Pegawai Negeri Sipil. PNS ialah subjek utama dalam suatu birokrasi yang berperan khusus untuk menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Dalam hal ini PNS merupakan unsur dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Kedudukan aparatur negara merupakan sebuah unsur abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas tinggi terhadap negara. Hal ini secara tidak langsung PNS dituntut harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya BKPSDM dalam mengawasi netralitas PNS pada Pilkada Tahun 2018 di Kota Jambi dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi BKPSDM dalam mengawasi netralitas PNS pada Pilkada Tahun 2018 di Kota Jambi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi dan telaah dokumen. Untuk menjamin validitas data yang digunakan penulis menggunakan teknik triangulasi data dan analisa pemikiran yang digunakan adalah analisa model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci: BKPSDM, Netralitas, PNS, Pilkada.